

STANDARDISASI BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Blasius Sudarsono
Pustakawan Madya PDII-LIPI

Disampaikan pada Pertemuan Pembahasan Perumusan SNI dan Pemberdayaan Panitia Teknik Bidang Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi. Jakarta, 4 November 2002.

PENDAHULUAN

Upaya membuat standar nasional untuk kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi sudah dilakukan sejak lama. Formal dari kegiatan ini sewaktu Proyek Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi pada Oktober Tahun 1974 membentuk Komisi Bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi No. 255/Kep/A.8./74. Komisi yang dipimpin oleh Luwarsih Pringgoadisurjo, MA beranggotakan tujuh orang pustakawan berasal dari Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDIN-LIPI), Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan - Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (LPMB), Biblioteca Bogoriensis - Departemen Pertanian (BB), Biro Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (BPP), Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK), dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Tugas Komisi antara lain adalah: melakukan inventarisasi standar-standar, mempelajari serta menentukan kebutuhan-kebutuhan akan standardisasi dalam bidang ini. Komisi ini dapat membentuk panitia-panitia teknis sesuai dengan kebutuhan; yang bertugas menyusun standar atau membahas persoalan tertentu dalam bidang yang bersangkutan (*Warta Standardisasi, 1975*).

Dengan dibentuknya komisi tersebut membuktikan telah adanya kesadaran akan perlunya standar perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Sekarang setelah hampir 30 tahun ternyata Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bidang ini baru berjumlah 17 buah (*lihat lampiran 1*). Jumlah ini relatif sangat kecil dibanding dengan standar sejenis di tingkat internasional (ISO) yang total berjumlah 99 (*lihat lampiran 2*). Tentunya harus dicari penyebab lambatnya pertumbuhan standar bidang ini serta dicari upaya mengatasinya. Hal ini perlu segera dilakukan karena logikanya dengan perkembangan teknologi pengelolaan informasi yang berjalan sangat cepat membutuhkan standar dan spesifikasi yang tepat apalagi dengan semakin perlunya kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan informasi. Apa yang disampaikan dalam

tulisan ini merupakan dugaan penulis atas penyebab lambatnya pertumbuhan standar di bidang ini. Selain itu juga disampaikan usulan untuk mengatasinya. Tentu semua ini berbasis pada pengalaman yang didapat penulis selama menjalani tugasnya.

KEBERAGAMAN PERKEMBANGAN INSTITUSI INFORMASI

Yang penulis maksudkan dengan institusi informasi dalam tulisan ini adalah semua lembaga yang berhubungan dengan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan bagi tenaganya. Perkembangan ini tentu tidak terlepas dari persepsi yang ada atas lembaga tersebut. Sebagai contoh misalnya belum ada kesamaan persepsi atas arti perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Hal ini terbukti antara lain dengan jargon *pusdokinfo* yang seakan tidak membedakan secara jelas akan perbedaan arti tiga kata tersebut. Ada yang berpendapat bahwa dokumentasi merupakan bagian dari perpustakaan. Sementara itu, di pihak lain (termasuk penulis) mengartikan dokumentasi lebih luas dari sekedar perpustakaan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sendiri juga membedakan panitia teknis untuk bidang dokumentasi dan informasi di satu pihak dengan panitia teknis perpustakaan dan kepastakaan di pihak lain. Namun, nampaknya belum jelaslah perbedaannya. Apa yang dimaksud oleh BSN dengan perpustakaan dan kepastakaan ini? Apakah beda ruang lingkup masing-masing panitia teknis itu? Situs BSN masih mengosongkan bidang kegiatan panitia 46S.

Panitia Teknis Perumusan Standar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi

No.	Nama Panitia Teknis	Kode	Instansi Teknis Penanggung Jawab	Bidang Kegiatan	Keputusan Kepala BSN
50.	Informasi dan Dokumentasi	154 S	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Dokumentasi, pengolahan informasi elemen data dalam administrasi, komersial dan industri serta yang berkaitan	Keputusan Kepala BSN Tahap II : No. 1637/BSN-1/HK.74/10/99
65.	Perpustakaan dan Kepustakaan	46 S	Perpustakaan Nasional		Keputusan Kepala BSN Tahap II : No. 1637/BSN-1/HK.74/10/99

Semua itu ke depan harus mulai kita perjelas. Namun, sebelumnya rasanya perlu kita tengok ke belakang keberagaman yang telah ada dalam perkembangan institusi informasi ini. Hal yang sangat mendasar tentunya adalah keberagaman kecepatan perkembangan perpustakaan pada waktu itu.

Tidak dapat disangkal bahwa PDIN waktu itu merupakan pemimpin dalam pengembangan bidang perpustakaan di Indonesia. Bahkan pendidikan perpustakaan sangat diwarnai dengan perkembangan praktik yang dijalankan oleh PDIN. PDIN sendiri menurut penulis agak terbelok karena telah tumbuh menjadi perpustakaan. Padahal sebenarnya adalah **pusat dokumentasi** yang diharapkan sesuai visi Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) sewaktu dibentuk pada tahun 1956. Fungsi itu jelas disebut dalam salah satu tugas MIPI adalah *mendaftarkan kepustakaan dan barang-barang yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berada di Indonesia*. Selanjutnya, lebih dijelaskan dalam salah satu sasaran MIPI pada waktu itu yaitu: *menjadikan MIPI sebagai salah satu pusat dokumentasi ilmu pengetahuan*.

Amat disayangkan bahwa rumusan tugas utama sewaktu dibentuknya PDIN hanya menjadi sekedar *menyediakan bahan bacaan*. Pemberian tugas ini jelas menganut batasan dokumentasi seperti yang dirumuskan dalam UU PRPS No 20 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa dokumentasi yang dimaksud dalam aturan itu adalah *dokumentasi pustaka*. Kepeloporan PDIN dalam bidang standardisasi perpustakaan 30 tahun lalu berhadapan dengan upaya pembangunan perpustakaan yang lebih menekankan pada kepraktisannya saja. Kelemahan yang penulis lihat juga pada praktik kepastakawanan yang sering tidak bertolak dari sudut teori. Akibatnya, ketaatan menjadi sangat lemah. Pertumbuhan perpustakaan waktu itu seakan berlomba menurut pemahaman masing-masing yang sangat beragam. Dapat diduga bahwa mereka pada waktu itu belum memerlukan standar.

Dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional sebenarnya dari pihak PDIN sudah ada harapan agar pengembangan standar yang berkaitan dengan praktik perpustakaan dapat dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Ini terlihat antara lain dengan diteruskannya draft INDOMARC oleh PDIN kepada Perpustakaan Nasional untuk pengembangan selanjutnya. Upaya pengembangan standar perpustakaan yang dirintis oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga selanjutnya ada di bawah pembinaan Perpustakaan Nasional. PDIN sendiri waktu itu berkonsentrasi pada program komputerisasi, khususnya dalam pengembangan pangkalan data literatur, dan masih bereksperimentasi dengan format dan cara kerja berkomputer. Selain itu, konsentrasi pada pelayanan informasi ilmiah lebih dominan dalam kegiatan hariannya. Dalam melayani permintaan informasi ini akses pada pangkalan data asing dan sumber ilmiah asing lainnya mendapat prioritas. Akibatnya, perhatian PDIN pada pengembangan standar menjadi berkurang.

Perhatian pada pengembangan standar perpustakaan juga sangat dipengaruhi oleh melemahnya kegiatan kerja sama antar perpustakaan yang telah muncul sejak 1971. Pertemuan sistem jaringan perpustakaan yang

dikoordinasikan oleh PDII-LIPI melemah pada saat munculnya ide membangun IPTEKnet. Padahal secara logika justru memasuki sitem jaringan komputer diperlukan berbagai standar baru. Sayangnya perkembangan IPTEKnet sendiri lebih condong pada pembangunan infrastruktur. Substansi informasi yang menjadi objek kerja unit perpustakaan kurang mendapat tempat. Pemikiran dan inisiatif pihak pendidikan sangat terbatas pada bidang standar ini. Semua itu diperparah karena sangat terbatasnya tenaga yang menekuni standar baik di PDII-LIPI maupun di perpustakaan lainnya. Dapat dikatakan dengan dibentuknya Pusat Standardisasi – LIPI kegiatan penyusunan standar di bidang perpustakaan tidak memiliki panitia teknis. Baru dengan dibentuknya BSN mulailah kembali resmi ada panitia teknis untuk bidang dokumentasi dan perpustakaan. Selain itu juga disepakati panitia teknis bidang perpustakaan dan ke pustakaan, yang telah disebut terdahulu perlu kejelasan ruang lingkupnya agar pengembangan standar di bidang ini akan lebih efektif.

PANITIA TEKNIS STANDARDISASI

Dalam sistem International Organization for Standardization (ISO), panitia teknis standardisasi bidang dokumentasi dan informasi adalah Technical Committee 46, Information and Documentation (TC 46). Cakupan kerja TC 46 meliputi standar yang berhubungan dengan perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi, layanan indeks dan abstrak, arsip, ilmu informasi dan publikasi. Panitia ini terdiri atas 3 working group dan 4 sub committee. Negara yang berpartisipasi berjumlah 32 dan 37 negara sebagai pengamat (observer). Indonesia masih berstatus pengamat. Dalam bidang dokumentasi di ISO terdapat juga TC 10: Technical Product Documentation. Cakupan panitia ini adalah : standardisasi dan koordinasi dari dokumentasi produk teknik, termasuk gambar teknik, baik yang dihasilkan secara manual maupun berkomputer guna tujuan teknis sepanjang siklus hidup produk untuk memfasilitasi persiapan, manajemen, penyimpanan, penemuan kembali, reproduksi, pertukaran dan penggunaan. Di Indonesia belum jelas pihak yang bertanggung jawab atas panita teknis ini.

Panitia teknis standardisasi bidang dokumentasi dan informasi diserahkan oleh BSN kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pusat Standardisasi dan Sistem Mutu (PSSM-LIPI) menjadi pelaksananya. Panitia teknis ini terdiri atas berbagai pihak yang dianggap mempunyai kepentingan dan kemampuan di bidang dokumentasi dan informasi. Beberapa pihal di luar LIPI antara lain berasal dari:

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

- Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya – UI.
- Pusat Pembinaan Bahasa
- Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
- Forum Organisasi Profesional Indonesia (FOPI)
- Penerbit
- dll.

Selama dua tahun terakhir ini telah diselesaikan empat rancangan SNI, dua sudah diusulkan ke BSN namun belum mendapatkan nomor SNI dan dua akan segera diusulkan. Dua rancangan yang akan segera diusulkan itu mengenai manajemen rekaman (*record*) dan penulisan judul pada punggung buku. Dalam penyusunan standar untuk perpustakaan, dokumentasi dan informasi selama ini lebih banyak bertolak dari adaptasi standar-standar ISO. Memang dapat dipertanyakan mengapa harus demikian. Jawaban yang sering kita dengar adalah demi mengejar ketinggalan kita dan demi kerja sama internasional. Apakah memang benar?

Bagi pihak yang telah sadar akan standar, kebutuhan akan standar di bidang dokumentasi dan informasi sangatlah tinggi. Amat disayangkan bahwa kesadaran ini ternyata masih tipis pada mayoritas pustakawan di Indonesia. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran untuk bersama membuat dan memakai standar yang sama. Yang terjadi, seperti telah disinggung di muka adalah masing-masing institusi informasi menerapkan “standar” menurut apa yang diketahui dan dimaui oleh lembaga sendiri-sendiri. Rasanya belum nampak keinginan untuk bersepakat. Padahal salah satu dasar yang digunakan dalam menentukan standar adalah konsensus. Keterbatasan akan sumber daya memaksa institusi informasi sering menerima saja sistem dengan format khusus yang dapat saja berbeda dengan standar yang ada. Tetapi yang jelas adalah bahwa SNI bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang kita miliki memang sangat kurang. Selain itu, sekali lagi: **kesadaran akan perlunya standar juga masih sangat kurang**

BEBERAPA PEMIKIRAN

Kelambatan pertumbuhan standar pertama disebabkan karena keterbatasan kemampuan panitia teknis. Umumnya anggota panitia teknis hanyalah bekerja paruh waktu. Belum ada tenaga tetap yang memang menekuni pembuatan standar. Dalam suasana serba terbatas seperti itu, mutlak diperlukan kerja bersama dalam semangat gotong-royong. Mungkin forum studi masalah standar perlu diadakan atau dibentuk sebagai laboratorium dan sekaligus sebagai tempat belajar. Namun, sebelum itu dilaksanakan tentu perlu diatur kembali cakupan dan tanggung jawab dua panitia teknis yang sudah ada.

Mudahnya kita lihat saja lampiran 2 dan mulai dibagi tugas, panitia mana yang seharusnya bertanggung jawab menyiapkan berbagai standar tersebut. Selain itu, perlu ditinjau kembali mekanisme yang sekarang dipakai untuk meningkatkannya. Komunikasi antar panitia teknis perlu juga ditingkatkan, sebagaimana juga dengan pihak BSN.

Keterbatasan dana merupakan hal kedua yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan standar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Selama ini dana pelaksanaan diperoleh melalui dana proyek. Keberhasilan dalam mengusulkan proyek sangat tergantung pada lembaga induk dan pihak keuangan. Namun penulis dalam hal ini tidak mempunyai otoritas untuk membicarakannya. Semua tergantung pada lembaga induk. Namun, walaupun dana bukan menjadi masalah lagi, tetap saja tenaga pelaksana masih sangat terbatas. Dalam hal ini kemungkinan bekerja sama dengan lembaga pendidikan perpustakaan dapat dicoba sehingga dapat dimanfaatkan tenaga mahasiswa. Dengan demikian laboratorium untuk mengembangkan standar dapat mulai diwujudkan.

Sosialisasi, penulis lihat sebagai faktor berikut yang menjadikan pertumbuhan standar lambat. Hasil yang telah dicapai dalam arti sudah menjadi SNI sebanyak 17 buah itu saja dapat dipertanyakan pihak mana yang bertanggung jawab atas sosialisasinya. Ternyata begitu lemahnya sosialisasi standar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi ini. Selain sosialisasi diperlukan juga pelatihan bagi pustakawan dan tenaga pelaksana lainnya. Pihak mana yang berwenang mengadakan pelatihan? Apakah panitia teknis juga berwenang sekaligus melaksanakan pelatihan? Kembali kepada masalah keterbatasan dana, mungkin pelatihan ini akan dapat menjadi salah satu cara mengatasi keterbatasan dana itu.

RANGKUMAN SEBAGAI PENUTUP

Di Indonesia, upaya membuat standar di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi sudah lama dilakukan, dan menjadi formal dengan dibentuknya Komisi Bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi No. 255/Kep/A.8./74. Namun hampir 30 tahun berlalu, pertumbuhan standar bidang ini ternyata sangat lambat. Kelambatan ini antara lain karena memang belum tingginya kesadaran pustakawan akan pentingnya standar nasional. Yang terjadi mereka melakukan praktik seadanya saja. Ini yang pertama harus diatasi hingga standar nasional menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dipandang perlu segera dilakukan sosialisasi secara luas standar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Penataan kembali panitia teknis serta mekanismenya dengan pihak BSN agar dicapai produktivitas yang lebih tinggi. Cakupan kewenangan masing-masing panitia teknis perlu juga dibicarakan kembali dan disepakati. Keterbatasan tenaga kiranya dapat sedikit diatasi dengan melibatkan mahasiswa dengan tugas akhir. Program sosialisasi dan pelatihan perlu dipikirkan pelaksanaannya agar dapat menjadi salah satu sumber dana bagi keberlanjutan pembinaan sistem standar di bidang dokumentasi dan informasi. Selain itu, forum kerja sama antar perpustakaan kiranya sudah mulai harus dihidupkan kembali.

REFERENSI

International Organization for Standardization. TC 10: technical product documentation. Tersedia on-line pada alamat:

<http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommittee>

International Organization for Standardization. TC 46: informaiton and documentation. Tersedia on-line pada alamat:

<http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommittee>

Warta Standarisasi (1975)

Kegiatan proyek pengembangan sistem nasional untuk standarisasi. *Warta standarisasi*, Volume 1, nomor 2, 1975. p. 24.

Lampiran 1.

DAFTAR STANDAR BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

SNI 19 – 1935 – 1990	Penentuan tajuk entri
SNI 19 – 1936 – 1990	Judul terbitan berseri; patokan penyingkatan
SNI 19 – 1937 – 1990	Halaman judul buku
SNI 19 – 1938 – 1990	Lembar data bibliografi laporan
SNI 19 – 1945 – 1990	Data statistik perpustakaan
SNI 19 – 1946 – 1990	Indeks penerbitan
SNI 19 – 1948 – 1990	Tajuk entri dan deskripsi bahan bukan buku
SNI 19 – 1949 – 1990	Deskripsi untuk monografi
SNI 19 – 1950 – 1990	Terbitan berkala
SNI 19 – 1951 – 1990	Direktori perpustakaan, pusat informasi dan dokumentasi
SNI 19 – 4190 – 1996	Rujukan karya tulis
SNI 19 – 4192 – 1996	Dokumentasi – Abstrak Publikasi (<i>direvisi</i>)

	<i>tahun 2001)</i>
SNI 19 – 4196 – 1996	Pemberian Nomor Standar ISSN
SNI 19 – 4193 – 1996	Kode Bahasa-bahasa di dunia
SNI 19 – 4194 – 1996	Dokumentasi – Penyajian Terjemahan – Unsur-unsur yang perlu diperhatikan penerbit
SNI 19 – 4195 – 1996	Dokumentasi – Penomoran bagian dan subbagian dalam dokumen tertulis
SNI 19 – (belum diberi nomor)	Dokumentasi – Laporan teknis
SNI 19 – (belum diberi nomor)	Dokumentasi – Penulisan tesis

Lampiran 2

STANDARDS OF INFORMATION AND DOCUMENTATION

<u>ISO 9:1995</u>	Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
<u>ISO 233:1984</u>	Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
<u>ISO 233-2:1993</u>	Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 2: Arabic language -- Simplified transliteration
<u>ISO 233-3:1999</u>	Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
<u>ISO 259:1984</u>	Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
<u>ISO 259-2:1994</u>	Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
<u>ISO 843:1997</u>	Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
<u>ISO 3166-1:1997</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes
<u>ISO 3166-2:1998</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 2: Country subdivision code
<u>ISO 3166-3:1999</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 3: Code for formerly used names of countries

<u>ISO 3602:1989</u>	Documentation -- Romanization of Japanese (kana script)
<u>ISO 5127:2001</u>	Information and documentation – Vocabulary
<u>ISO 7098:1991</u>	Information and documentation -- Romanization of Chinese
<u>ISO 9706:1994</u>	Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence
<u>ISO 9984:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters
<u>ISO 9985:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters
<u>ISO 11108:1996</u>	Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability
<u>ISO 11798:1999</u>	Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods
<u>ISO 11800:1998</u>	Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
<u>ISO 11940:1998</u>	Information and documentation -- Transliteration of Thai
<u>ISO/TR 11941:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters
<u>ISO 15919:2001</u>	Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
TC 46/SC 4	
<u>ISO 2709:1996</u>	Information and documentation -- Format for Information Exchange
<u>ISO 5426-2:1996</u>	Information and documentation – Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange -- Part 2: Latin characters used in minor European languages and obsolete typography
<u>ISO 6630:1986</u>	Documentation -- Bibliographic control characters
<u>ISO 6861:1996</u>	Information and documentation – Glagolitic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

<u>ISO 8459-1:1988</u>	Documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 1: Interloan applications
<u>ISO 8459-2:1992</u>	Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 2: Acquisitions applications
<u>ISO 8459-3:1994</u>	Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 3: Information retrieval applications
<u>ISO 8459-4:1998</u>	Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 4: Circulation applications
<u>ISO 8459-5:2002</u>	Information and documentation -- Bibliographic data element directory -- Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata
<u>ISO 8777:1993</u>	Information and documentation -- Commands for interactive text searching
<u>ISO 8957:1996</u>	Information and documentation -- Hebrew alphabet coded character sets for bibliographic information interchange
<u>ISO 10160:1997</u>	Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition
<u>ISO 10161-1:1997</u>	Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification
<u>ISO 10161-2:1997</u>	Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma
<u>ISO 10754:1996</u>	Information and documentation -- Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange
<u>ISO 12083:1994</u>	Information and documentation -- Electronic manuscript preparation and markup (Exists also on disks (XL), price code of paper copy together with disks XP)
<u>ISO 17933:2000</u>	GEDI -- Generic Electronic Document Interchange
<u>ISO 23950:1998</u>	Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service definition and protocol specification

TC 46/SC 8	
<u>ISO 2789:1991</u>	Information and documentation -- International library statistics
<u>ISO 9230:1991</u>	Information and documentation -- Determination of price indexes for books and serials purchased by libraries
<u>ISO 9707:1991</u>	Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
<u>ISO 11620:1998</u>	Information and documentation -- Library performance indicators
TC 46/SC 9	
<u>ISO 4:1997</u>	Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
<u>ISO 8:1977</u>	Documentation -- Presentation of periodicals
<u>ISO 18:1981</u>	Documentation -- Contents list of periodicals
<u>ISO 214:1976</u>	Documentation -- Abstracts for publications and documentation
<u>ISO 215:1986</u>	Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
<u>ISO 690:1987</u>	Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure
<u>ISO 690-2:1997</u>	Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereof
<u>ISO 832:1994</u>	Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
<u>ISO 999:1996</u>	Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
<u>ISO 1086:1991</u>	Information and documentation -- Title leaves of books
<u>ISO 2108:1992</u>	Information and documentation -- International standard book numbering (ISBN)
<u>ISO 2145:1978</u>	Documentation -- Numbering of divisions and subdivisions in written documents
<u>ISO 2384:1977</u>	Documentation -- Presentation of translations
<u>ISO 2788:1986</u>	Documentation -- Guidelines for the establishment and

	development of monolingual thesauri
<u>ISO 3297:1998</u>	Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
<u>ISO 3901:2001</u>	Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)
<u>ISO 5122:1979</u>	Documentation -- Abstract sheets in serial publications
<u>ISO 5123:1984</u>	Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials
<u>ISO 5963:1985</u>	Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms
<u>ISO 5964:1985</u>	Documentation -- Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
<u>ISO 6357:1985</u>	Documentation -- Spine titles on books and other publications
<u>ISO 7144:1986</u>	Documentation -- Presentation of theses and similar documents
<u>ISO 7154:1983</u>	Documentation -- Bibliographic filing principles
<u>ISO 7220:1996</u>	Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards
<u>ISO 7220:1996/Cor 1:2001</u>	
<u>ISO 7275:1985</u>	Documentation -- Presentation of title information of series
<u>ISO/TR 8393:1985</u>	Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International Standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules
<u>ISO 10324:1997</u>	Information and documentation -- Holdings statements - - Summary level
<u>ISO 10444:1994</u>	Information and documentation -- International standard technical report number (ISRN)
<u>ISO 10957:1993</u>	Information and documentation -- International standard music number (ISMN)
<u>ISO 15707:2001</u>	Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC)
TC 46/SC 11	
<u>ISO 15489-1:2001</u>	Information and documentation -- Records management

	– Part 1: General
<u>ISO/TR 15489-2:2001</u>	Information and documentation -- Records management – Part 2: Guidelines
<u>ISO 9:1995</u>	Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
<u>ISO 233:1984</u>	Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
<u>ISO 233-2:1993</u>	Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 2: Arabic language -- Simplified transliteration
<u>ISO 233-3:1999</u>	Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
<u>ISO 259:1984</u>	Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
<u>ISO 259-2:1994</u>	Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
<u>ISO 843:1997</u>	Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
<u>ISO 3166-1:1997</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country codes
<u>ISO 3166-2:1998</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code
<u>ISO 3166-3:1999</u>	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries
<u>ISO 3602:1989</u>	Documentation -- Romanization of Japanese (kana script)
<u>ISO 5127:2001</u>	Information and documentation – Vocabulary
<u>ISO 7098:1991</u>	Information and documentation -- Romanization of Chinese
<u>ISO 9706:1994</u>	Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence
<u>ISO 9984:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters
<u>ISO 9985:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of

	Armenian characters into Latin characters
<u>ISO 11108:1996</u>	Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability
<u>ISO 11798:1999</u>	Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods
<u>ISO 11800:1998</u>	Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
<u>ISO 11940:1998</u>	Information and documentation -- Transliteration of Thai
<u>ISO/TR 11941:1996</u>	Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters
<u>ISO 15919:2001</u>	Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
